



# DPMDPPKB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas karunianya dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang telah berhasil disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebagai pengendali peningkatan kinerja berdasarkan sasaran strategis, urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta ini akan menjadi masukan terhadap Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	4
2.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	23
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	25
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	28
3.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan	28
3.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	29
BAB IV PENUTUP	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan suatu pertanggungjawaban dari Implementasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati Pesisir Selatan, terhadap Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 dan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 Tahun Anggaran yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Menjabarkan secara rinci proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari sebelum dilaksanakan, saat berlangsung dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan ini juga dapat menggambarkan masalah yang dihadapi oleh setiap pelaksana kegiatan dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kegiatan di masa mendatang.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang berdasarkan proses pelaksanaan tahun sekarang.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing pihak yang terlibat, serta apapun yang menyangkut keuangan, termasuk pemasukkan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati Pesisir Selatan.

**BAB II**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2024 dengan melaksanakan Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
4. Program Pengendalian Penduduk;
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

Adapun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mendapatkan Total Pagu Anggaran **Rp. 13.357.074.145,-** Terrealisasi Anggaran **Rp. 12.060.667.517,-** sedangkan untuk Capaian Anggaran **90,29%** dengan Rincian Capaian Kinerja Tahun 2024 yang disusun pada tabel sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Tahun 2024  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A 81,00%	A 80,44%	99,31%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.153.341.465	Rp. 4.641.315.471	90,06%
		Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)	30,77% (56 Nagari)	175,00%	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 100.881.200	Rp. 96.196.205	95,36%
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.254.559.383	Rp. 1.206.466.994	96,17%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%				
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61	70,5	115,57%	Pengendalian Penduduk	Rp. 283.315.042	Rp. 253.531.912	89,49%
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.564.977.055	Rp. 5.863.156.935	89,31%
<b>Total</b>					<b>97,47%</b>		<b>Rp. 13.357.074.145</b>	<b>Rp. 12.060.667.517</b>	<b>90,29%</b>

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

2. Capaian Kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang dihadapi serta Solusi Pemecahannya

Tabel 2.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran 2024

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	90	5.153.341.465	4.641.315.471
			2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	24	18.444.800	18.407.400

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	24	18.444.800	18.407.400
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>4.191.126.305</b>	<b>3.785.467.838</b>
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	33	33	4.125.862.305	3.720.285.838
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	65.264.000	65.182.000
				<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>6.404.400</b>	<b>4.027.600</b>
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	6.404.400	4.027.600
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>338.490.403</b>	<b>328.239.884</b>
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	3	4.133.900	3.064.000

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	5	60.461.714	55.970.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	34.521.534	34.520.200
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	29.454.255	29.454.105
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	1.800.000	1.650.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	18.315.000	13.800.600
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	189.804.000	189.780.979
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>29.914.500</b>	<b>28.250.000</b>
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	3	3	29.914.500	28.250.000

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	91	234.881.057	212.680.249
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	1	44.849.980	32.212.280
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	190.031.077	180.467.969
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	79	334.080.000	264.242.500
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	40.690.000	40.102.950
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak, dan Perizinannya	Unit	70	61	269.160.000	202.249.550
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	23	21	8.350.000	7.650.000
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	15.880.000	14.240.000

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang memiliki Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	%	100	95	100.881.200	96.196.205
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	182	182	100.881.200	96.196.205
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	16.393.400	14.928.500
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	25.000.000	24.230.000
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	15	15	34.487.800	34.481.950
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	2	2	25.000.000	22.555.755

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Dasawisma Maju	%	100	96	1.254.559.383	1.206.466.994
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	%	100	96	1.254.559.383	1.206.466.994
				Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	15.480.900	13.910.500
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruuna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	1269	1269	1.239.078.483	1.192.556.494

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	89	283.315.042	253.531.912
			2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	283.315.042	253.531.912
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1	84.115.042	83.689.020

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedianya	Dokumen	1	1	109.200.000	109.150.000
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	1	90.000.000	60.692.892
				<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	%	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>6.564.977.055</b>	<b>5.863.156.935</b>
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah Dokumen Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Dokumen	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.513.989.855</b>	<b>1.293.299.350</b>
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1	858.999.855	762.548.800

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	180	180	224.998.000	186.600.000
				Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	2	150.000.000	108.685.000
				Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	1	1	279.992.000	235.465.550
				<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Jumlah Organisasi yang mengikuti Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Organisasi	1	1	546.000.000	529.850.000
				Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	1	546.000.000	529.850.000

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	763.146.000	746.854.585
				Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	44.970.555	44.528.545
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2250	2000	656.375.445	640.802.240
				Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	61.800.000	61.523.800

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	15	15	3.741.841.200	3.293.153.000
				Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	1	3.749.000	3.749.000
				Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	1	1	1.409.492.200	1.207.524.000
				Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Kampung	15	15	2.328.600.000	2.081.880.000
<b>Total Anggaran (Rp.)</b>									<b>13.357.074.145</b>	<b>12.060.667.517</b>

Sumber Data : Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan Realisasi Anggaran dari Fungsional Desember Tahun 2024

▪ **Permasalahan dan Solusi :**

✚ **Permasalahan :**

**1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya :**

1. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan RKP Nagari disinkronisasikan dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan;
2. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri;
3. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang Kepengurusan KAN dan Historis Adat dimasing-masing KAN di Kab. Pesisir Selatan;
4. Belum banyaknya peran dari LPMN dalam Forum Musrenbang Nagari;
5. Masih kurangnya SDM sebagai Pengurus PKK dan kurangnya peranan PKK dalam Masyarakat.

**2. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan :**

1. Tidak memadainya anggaran kegiatan KKN yang dilaksanakan di Kab. Pesisir Selatan yang lokasinya berada di berbagai Kecamatan untuk mendukung kegiatan KKN ini;
2. Adanya UPK yang bermasalah dengan hukum;
3. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK dari pengurus serta banyaknya masa periode kepengurusan habis dan tidak aktif;
4. Tidak sinkronnya kegiatan unit usaha yang dijalankan dengan keadaan dan potensi Nagari akan memberikan Pendapatan Asli Nagari (PAN);
5. Adanya UPK yang belum bertransformasi ke BUMNag Bersama;
6. Tidak dapat diikutinya kegiatan lomba TTG dan BUMNag, baik Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional karena tidak adanya anggaran;
7. Kurangnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari, Kecamatan dan Provinsi karena keterbatasan anggaran.

### **3. Bidang Pemerintahan Nagari :**

1. Banyaknya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman Pemerintah Nagari tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Belum memenuhi syarat sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Belum terkelolanya Penataan Aset Nagari dan kurangnya dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
5. Belum optimalnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi antara Pemerintah Nagari, Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

### **4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Kurangnya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan dari 182 Nagari sedangkan Jumlah PKB hanya 36 Orang persebaran tidak merata;
2. Kurangnya minat akseptor dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
3. Kurangnya perhatian dan pembinaan serta dukungan dana untuk Pembinaan Penyuluh Kampung KB;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan lintas sektor terhadap perkembangan kegiatan di Kampung KB;
5. Pelaksanaan kegiatan harus ditalangi dulu oleh Koordinator Lapangan untuk semua kegiatan BOKB;
6. Keterbatasan anggaran untuk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi dari Kabupaten sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk dari Nagari dan Kecamatan, sedangkan lokasi sasaran yang akan dilakukan pendampingan memerlukan biaya transportasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;
7. Kurangnya dukungan dana APBD sebagai Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan yang terdapat 182 Nagari dan 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan pada Program Bangga Kencana untuk Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) karena tidak mencukupi dari APBN (BOKB) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, maka sangat perlunya support dari APBD (DAU) untuk kelancaran tugas Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

 **Solusi :**

**1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya :**

1. Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari dengan memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan untuk mendampingi Nagari dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan DU-RKP Nagari tahun berikutnya;
2. Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri dari berbagai aspek yang telah ditetapkan;
3. Agar 37 KAN di Kab. Pesisir Selatan membuat Monografi Adat secara tertulis, agar penyelenggaraan KAN dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Agar LPMN mempunyai peranan dalam Forum Musrenbang Nagari dan memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam kelembagaan di Nagari;
5. Memanfaatkan SDM yang ada untuk dilakukan Sosialisasi dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Pengurus PKK serta memiliki peranan PKK di masyarakat.

**2. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan :**

1. Untuk Kegiatan KKN Tematik yang diadakan di Kab. Pesisir Selatan pelaksanaannya langsung dilakukan dilokasi kegiatan KKN;
2. Memfasilitasi data dan informasi terkait UPK yang bermasalah;
3. Memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ada untuk mendampingi proses pembentukan dan pengaktifan BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK yang bermasalah, habis masa kepengurusan serta yang kurang aktif;
4. Lebih memberdayakan lagi pendamping yang ada di Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten untuk memverifikasi Unit Usaha yang ada di Nagari agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Nagari sehingga dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN);

5. Untuk UPK yang belum bertransformasi diserahkan ke DPMD Provinsi Sumatera Barat;
6. Kegiatan TTG dan BUMNag yang diselenggarakan setiap Tahun tidak diikuti;
7. Merekap data yang dikirim oleh Kecamatan terkait data BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

### **3. Bidang Pemerintahan Nagari :**

1. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang regulasi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Nagari melalui Peningkatan Kapasitas, Bimtek atau Pembinaan ke Nagari;
2. Perlu dilaksanakan Bimtek secara berkelanjutan untuk Perangkat Nagari dan membuat forum diskusi bagi Perangkat Nagari bersama OPD terkait (DPMDPKB, BPKPAD dan Inspektorat) untuk berkoordinasi tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Mewajibkan setiap Nagari mengirimkan 1 Perwakilan dari 182 Nagari untuk mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari;
4. Agar sesuai dengan persyaratan sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta berpedoman dengan peraturan yang berlaku ditetapkan;
5. Perlunya koordinasi antar pihak agar Penataan Aset di Nagari dapat terkelola dengan baik dan dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
6. Perlunya dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari.

### **4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Mengoptimalkan pertemuan rapat koordinasi bulanan di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dengan PKB/PLKB Kecamatan, agar adanya minat akseptor menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
2. Pembagian wilayah kerja sasaran berdasarkan domisili Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilakukan ke 182 Nagari, dalam 1 Nagari rata-rata hanya terdapat 1-2 Orang sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk itu perlu diajukan penambahan anggaran dan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;

3. Penyuluh KB agar melakukan koordinasi dengan lintas sektor;
  4. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada Rencana Kerja Bulanan, sehingga kegiatan dilaksanakan dapat terukur sesuai target yang ditetapkan;
  5. Perlu adanya peningkatan dan penambahan anggaran untuk Pembinaan Kampung KB;
  6. Perlunya pemberian pemahaman kepada PKB/PLKB dan masyarakat serta lintas sektor tentang dukungan dan perhatian terhadap Kampung KB;
  7. Setiap program dan kegiatan di Nagari sebaiknya dilibatkan Kampung KB.
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Dalam hal mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Dokumen Perangkat Daerah yang telah dievaluasi dan dilakukan penilaiannya, Berdasarkan Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja A (81,00%) dan terrealisasi kinerja A (80,44%) sedangkan untuk capaian kinerja 99,31%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.153.341.465 dan terrealisasi anggaran Rp. 4.641.315.471 sedangkan untuk capaian anggaran 90,06%.

- Persentase Nagari Mandiri diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM), terdiri dari Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri dan dilakukan penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari) dan terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk capaian kinerja 175,00%.

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 100.881.200 dan terrealisasi anggaran Rp. 96.196.205 sedangkan untuk capaian anggaran 95,36%.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 1.254.559.383 dan terrealisasi anggaran Rp. 1.206.466.994 sedangkan untuk capaian anggaran 96,17%.

## 2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100 dan terrealisasi kinerja 0 sedangkan untuk capaian kinerja 0,00%.

## 3. Terwujudnya Keluarga Bahagia

- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga yang dibentuk dari 17 Variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori, yaitu :
  - a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
  - b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70;
  - c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target kinerja 61 dan terrealisasi kinerja 70,5 sedangkan untuk capaian kinerja 115,57%.

Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 283.315.042 dan terrealisasi anggaran Rp. 253.531.912 sedangkan untuk capaian anggaran 89,49%.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp. 6.564.977.055 dan terrealisasi anggaran Rp. 5.863.156.935 sedangkan untuk capaian anggaran 89,31%.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerja 97,47%. Sedangkan Program yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total anggaran Rp. 13.357.074.145 dan terrealisasi anggaran Rp. 12.060.667.517 sedangkan untuk capaian anggaran 90,29%.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 dengan pengukuran sasaran strategis, maka diperoleh rata-rata capaian program 90,29%. Berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik.

## 2.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan untuk mencapai yang ingin diwujudkan dan mengacu pada Visi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

Selanjutnya Misi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan yang ingin diwujudkan pada Misi Nomor 1, 2, 4, 5, 6, yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis;

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas”.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A 81,00%
		Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Tabel 2.4. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 100.881.200	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.254.559.383	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.153.341.465	APBD
4.	Pengendalian Penduduk	Rp. 283.315.042	DAK Non Fisik KB
5.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.564.977.055	APBD, DAK Non Fisik KB
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 13.357.074.145</b>	

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

### 2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.1.4.2/26/Set.DPRD/2024 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut Pemerintah Daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap LKPj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	2.	3.	4.
1.	Diminta kepada Kepala Daerah C.q. DPMDPPKB untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan PILWANA Serentak Tahun 2025 bagi Wali Nagari yang sudah habis masa jabatannya.	Terkait dengan Penganggaran PILWANA Serentak Tahun 2025, sudah dialokasikan ke DPMDPPKB (Bidang Nagari). Untuk Pelaksanaan PILWANA Serentak sebanyak 58 Nagari yang mana kegiatan tersebut sesuai Perencanaan akan dilaksanakan bulan Mei Tahun 2025. Sampai saat ini kita masih menunggu Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Melakukan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2025 bagi Wali Nagari yang sudah habis masa jabatannya di Kabupaten Pesisir Selatan.
2.	Diminta kepada Kepala Daerah C.q. DPMDPPKB untuk melakukan review dan pengawasan terhadap anggaran program kegiatan ketahanan pangan di seluruh Pemerintahan Nagari.	Terkait review dan pengawasan anggaran ketahanan pangan di seluruh nagari kita laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan TUPOKSI DPMDPPKB tentang Pembinaan dan Pengawasan. Namun kendala yang dihadapi adalah ketersediaan anggaran untuk pengawasan sangat minim, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan untuk seluruh Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.	Melakukan Review dan Pengawasan Penyaluran Dana Desa untuk Ketahanan Pangan di seluruh Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	2.	3.	4.
3.	Diminta kepada Kepala Daerah Cq. DPMDPPKB untuk melakukan audit khusus seluruh BUMNag.	Di Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata BUMNag banyak yang sudah habis masa kepengurusannya untuk 182 BUMNag. Seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMNag, dimana salah satu syarat untuk pembentukan BUMNag harus berbadan Hukum dari Kemenkumham. Kami DPMDPPKB pada Tahun 2024 sudah melakukan Pembinaan untuk BUMNag di beberapa Kecamatan, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan serta monevnya sehingga kurang maksimal kami lakukan. Untuk Audit BUMNag Tahun 2025 kami DPMDPPKB sudah menganggarkan rencana kegiatannya, namun karena keterbatasan anggaran pada Tahun 2025, maka untuk Audit BUMNag dipending kegiatannya.	Melakukan Audit Khusus Seluruh BUMNag agar dapat mengetahui aktif atau tidaknya BUMNag tersebut yang sudah habis masa kepengurusannya untuk 182 BUMNag di Kabupaten Pesisir Selatan.
4.	Diminta kepada Kepala Daerah Cq. DPMDPPKB untuk meningkatkan kinerja KB dalam penurunan angka stunting.	DPMDPPKB meningkatkan kinerja terkait stunting melalui beberapa kegiatan, diantaranya : - Meningkatkan kapasitas pengelolaan stunting PKB di Tingkat Kecamatan. Adapun cara meningkatkan kapasitas dengan melaksanakan kegiatan Bimbingan Terpadu Keluarga Berencana (Bindu KB) yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penekanan terkait dengan tata cara pengelolaan kegiatan stunting di Tingkat Kecamatan. Selain itu pada kegiatan BINDU KB juga dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kecamatan melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.	Melakukan Peningkatan Kinerja terkait Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	2.	3.	4.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan dengan cara turun langsung ke Balai KB bahkan sampai ke Tingkat Nagari. Tujuannya agar permasalahan yang terjadi segera mendapatkan solusi, sehingga Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan dapat bekerja secara efektif dan efisien.</li> <li>- Meningkatkan Kapasitas TPK dalam melakukan pendampingan kepada sasaran beresiko stunting dilapangan. Kapasitas TPK ditingkatkan melalui kegiatan Orientasi TPK yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya pada setiap Kecamatan. Selain itu Kabid PPKB dan jajarannya melakukan bimbingan kepada TPK melalui Wa Grup TPK Se-Kabupaten. Bimbingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa TPK melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan stunting yang diturunkan oleh Pusat. Selain itu, melalui Wa Grup TPK Bidang KB memantau perkembangan progres pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting setiap hari. Karena TPK melaporkan kegiatan pendampingan melalui Wa Grup setiap harinya.</li> </ul> <p>Selain kegiatan tersebut, Bidang PPKB juga melakukan review capaian kinerja TPPS di seluruh Lini Lapangan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan dicapai secara maksimal.</p>	

Sumber Data : Bidang DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS**  
**PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

**3.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan**

Uraian mengenai Identifikasi Urusan Pemerintahan yang menjadi Tugas Pembantuan, yaitu :

**3.1.1. Identifikasi tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya. Alokasi Anggaran serta Realisasi Anggaran, dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya Tahun Anggaran 2024

No.	Perangkat Daerah	Program	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Penyerapan (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tidak Ada Tugas Pembantuan				
<b>Total (Rp.)</b>					

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

**3.1.2. Identifikasi tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya, karena tidak ada mendapatkan tugas pembantuan yang diberikan. Alokasi Anggaran serta Realisasi Anggaran, dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya Tahun Anggaran 2024

No.	Perangkat Daerah	Program	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Penyerapan (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tidak Ada Tugas Pembantuan				
<b>Total (Rp.)</b>					

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

### **3.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah tingkat di atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintah di bawahnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya dan tidak ada Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya, karena tidak ada mendapatkan tugas pembantuan yang diberikan. Jadi tidak adanya hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaiannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerja 97,47%. Sedangkan untuk melaksanakan 2 Urusan, 5 Program, 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total anggaran Rp. 13.357.074.145 dan terrealisasi anggaran Rp. 12.060.667.517 sedangkan untuk capaian anggaran 90,29%.
2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran Sebelumnya pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2025 bagi Wali Nagari yang sudah habis masa jabatannya, Review dan Pengawasan terhadap Ketahanan Pangan di Seluruh Pemerintahan Nagari, Audit Khusus Seluruh BUMNag dan Meningkatkan Kinerja KB dalam Penurunan Angka Stunting.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya dan tidak ada Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya, karena tidak ada mendapatkan tugas pembantuan yang diberikan.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini akan menjadi masukan terhadap Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Painan, 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN**

  
**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780215 199802 1 001